YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN : 2808-2346
e-ISSN : 2808-1854

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v3i4.1538

ANALISIS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Andi Dzakiyatul Aliyah[1], Eka Salma Dina[2], Muhammad Amril Saifuddin[3]
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
aliyah2000031273@webmail.uad.ac.id ; eka2000031105@webmail.uad.ac.id

Abstract

Quality education is education that is able to carry out the process of maturing the quality of students which is developed by freeing students from ignorance and incompetence. With quality education, generations or superior human resources will be born in all aspects of life. Many policies have been carried out by the government to improve the quality of education, such as the independent learning policy. Educational institutions are no less lagging behind in improving the quality of education by continuing to improve the quality of human resources, as well as the quality of learning. The method used in this research is a qualitative descriptive method using the literature study method. The literature used is literature that is relevant to the problems and research objectives, such as books, journal articles, proceedings and research research reports that aim to describe the independent learning policy as an effort to improve the quality of education. While the sources taken are from scientific books that have been published with the intention of being used as reference material. The results of this study indicate that the implementation of the independent learning policy can be carried out through improving the quality of education, the learning process, commitment from teachers, support from school principals, and the educational curriculum.

Keywords *: Education; Policy; Independent Study*

Abstrak : Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Dengan adanya pendidikan yang bermutu maka akan terlahir generasi atau sumber daya manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti kebijakan merdeka belajar. Institusi pendidikan juga tidak kalah tertinggal dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kualitas pembelajarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Literatur yang digunakan adalah literatur yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, seperti buku, artikel jurnal, prosiding dan laporan penelitian penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kebijakan merdeka belajar sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan sumber yang diambil yaitu dari buku-buku ilmiah yang sudah diterbitkan dengan maksud untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengimplementasian kebijakan merdeka belajar dapat dilakukan melalui peningkatkan mutu pendidikan, proses pembelajaran, komitmen dari guru, dukungan dari kepala sekolah, dan kurikulum pendidikan.

Kata Kunci : Pendidikan; Kebijakan; Merdeka belajar

Jurnal Yasin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berasal dari kata bijak yang mempunyai arti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan). Dan dalam bahasa Inggris kebijakan diartikan sebagai *"policy"* yang berati *plan of action atay statemen of aims.* Menurut HAR. Tilaar (2009) kebijakan pendidikan diartikan sebagai analisis hukum atau aturan yang mengatur pelaksanan sistem pada pendidikan, yang didalamnya mencakup tujuan pendidikan dan bagaimana dalam mencapai tujuan tersebut. Nugroho mekemukakan dalam bukunya yang berjudul Kebejakan pendidikan, bahwa kebijakan pendidikan adalah kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam pesaing global, itu kenapa kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama di dalam era globalisasi.

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan adalah dengan cara membuat kebijakan baru terkait kurikulum. Kurikulum yang telah dirangcang oleh pemerintah terkhusus kepada menteri pendidikan ialah kurikulum merdeka belajar. Rancangan kurikulum merdeka belajar ini sangat menekankan kepada pemberian, serta kebebasan dalam bidang Pendidikan, maka dari itu peran guru adalah sebagai fasiliator bagi siswa dalam memberikan pembelajaran (Syahrul Kaffin Robbani, 2023).

Konsep perencanaan yang matang dan akan tertuang dalam proses pembelajaran akan menjadi dasar dan panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas sehingga tidak melenceng dari kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diccapai. Kompetensi pada abad-21 memiliki pengertian yang sangat luas yang terfokus kepada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ditekankan pada apa yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah, dalam dunia kerja dan kehidupan mereka. Menurut Nadiem Anwar Makarim merdekan belajar adalah salah satu komponen kebijakan yang dicanangkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Nadiem menyebut bahwa kurikulum ialah dasar akan adanya pembelajaran. Pembelajaran dalam sistem Merdeka belajar memandan bahwa proses pembelajaran harus diimplementasikan memalui model pembelajaran yang inovatif (Sari, 2019). Nadiem merancang kebijakan merdeka belajar bukan tidak tanpa alasan. Hasil penelitan *programme for international student assesment* (PISA) pada tahun 2019 menunjukan hasil penelian yang kurang memuaskan pada peserta didik Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Dapat mengetahui proses kebijakan merdeka dalam proses belajar. 2) Dapat mengetahui impek dari kebijakan merdeka belajar

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya (Husni, 2023). Literatur yang digunakan adalah literatur yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, seperti buku, artikel jurnal, prosiding dan laporan penelitian. Kajian literatur merupakan salah satu komponen yang sangat penting sebagai *contect review*. Karna dengan adanya literatur sangat membantu bagi penulis dalam memberi konteks erta arti dalam penulisan yang sedang dilakukan dengan literatur juga peneliti dapat menyertakan secara eksplisit yang akan memudahkan pembaca mengetahui, mengaoa hal yang ingin diteliti adalah judul tersebut, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan yang dipilih oleh penelitti dan dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian yang relevan (Saputra 2023). Kemudian data yang diperoleh dari literatur dianalisis dengan metode analisis konten. Analisis konten adalah metode analisis data yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang ada di dalam teks atau literatur. Adapun langkah-langkah dalam analisis konten yang meliputi merumuskan pertanyaan penelitian, memilih sumber literatur yang relevan, menyeleksi data-data dalam literatur tersebut, membuat kategori yang digunakan dalam analisis, meringkas dan memperjelas isi ringkasan, menginterpretasi dan menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan teori yang didapatkan (Agustinus Tangga Daga, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kebijakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berasal dari kata bijak yang memiliki arti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), cerdas, dan pandai bercakap-cakap. Dalam bahasa Inggris kebijakan diartikan sebagai "policy" yang berarti plan of action atau statemen of aims. Adapun yang dimaksud kebijakan disini yaitu pernyataan cita-cita, tujuan, harapan, atau prinsip untuk mencapai sasaran. Dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka bersama dalam mencapai tujuannya (Salamun &

Sauri, 2023). Ketika berbicara mengenai kebijakan tentu pikiran kita akan tertuju dengan pemerintah dan urusan publik, dan yang akan dibahas disini adalah mengenai kebijakan pendidikan. Latar belakang diperlukannya kebijakan pendidikan salah satunya adalah tujuan negara, dimana tujuan negara tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliknya. Menurut Duncan MacRae (1976) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan, jadi penulis merumuskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu proses evaluasi kebijakan untuk tujuan tertentu (Sari, 2019). Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Pendidikan, mengemukaan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Kebijakan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dijabarkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pendidikan, karena satu langkah keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang diambil akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan itu sendiri (Muslikh, 2020). Agar dampak negatif dari suatu kebijakan dapat diminimalisir maka diperlukan suatu efektivitas dan efisiensi dalam proses penentuan kebijakan pendidikan.

B. Definisi Merdeka Belajar

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI (Kemendikbud RI) beberapa bulan lalu menegaskan bahwa ada kebijakan baru dalam dunia pendidikan, kebijakan tersebut yaitu "Merdeka Belajar". Merdeka belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan (Ummul, 2023). Merdeka belajar merupakan kebijakan baru yang dicetuskan oleh Bapak menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju Nadiem Anwar Makarim. Merdeka belajar terlahir dari banyaknya problem yang ada dalam pendidikan, terutama yang terfokus pada pelaku atau pemberdayaan manusianya. Merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Memberi beban kepada anak di luar kemampuannya adalah tindakan yang tercela yang secara esensi berlawanan dengan semangat merdeka belajar. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Ini tak ubahnya seperti siswa tuna netra lalu guru memintanya menceritakan keindahan pemandangan kepada teman-temannya (Nofia, 2020).

Setelah diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, terjadi banyak perubahan terutama dari sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang sekarang hanya dilaksanakan di dalam kelas akan berubah dan dibuat senyaman mungkin agar mempermudah interaksi antara murid dan guru. Salah satunya yaitu belajar dengan outing class, dimana outing class ini adalah salah satu program pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas agar siswa memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Outing class juga merupakan metode belajar yang menyenangkan, mengajarkan para siswa untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Selama pembelajaran dengan menggunakan metode ini, guru dan siswa akan lebih dapat membangun keakraban, lebih santai, dan tentunya lebih menyenangkan (Desrianti & Yuliana Nelisma, 2022). Dengan setiap hari belajar di dalam kelas selama bertahun-tahun tentunya sudah menjadi hal yang lumrah atau bahkan membosankan, jadi tidak ada salahnya jika kita sebagai pendidik memberikan sesuatu yang berbeda pada proses pembelajaran. Sistem pembelajaran akan didesain sedemikian rupa agar

karakter siswa terbentuk, dan tidak terfokus pada sistem perangkingan yang menurut beberapa penelitian hanya meresahkan, tidah hanya bagi guru tetapi juga anak dan orang tuanya (Afista et al., 2020).

C. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Strategi adalah sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau diimplementasikan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan, berupa Sasaran-sasaran jangka panjang, kendala-kendala luas dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sendiri oleh sang pemimpin atau yang diterimanya oleh pihak atasannya, yang membatasi skope aktivitas-aktivitas organisasi tersebut dan kelompok-kelompok rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan ekspektasi akan diberikannya sumbangsih mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut (Ummul, 2023).

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan. Untuk menjawab tantangan Nasional dan Internasional maka perlu menerapkan pendidikan bermutu. Dimana pendidikan bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang kompeten dan beradab dalam arti menghasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dari segi kuantitas merujuk pada suatu seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai sasaran, sedangkan dari segi kualitas mengarah pada nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Dari segi kuantitas jumlah anak yang sekolah menunjukan perkembangan yang sangat pesat, namun dari segi kualitas dunia pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan dunia global. Strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (kemendikbud), berbagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu (Rahmansyah, 2021).

Salah satu program pemerintah yang sekarang adalah kebijakan merdeka belajar. Salah satu ide pokok dari kebijakan merdeka belajar tersebut adalah terfokus pada kemerdekaan sumber daya manusianya. Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pendidikan guru memiliki peran yang

sangat penting, karena sebaik apapun sistem pendidikan tanpa didukung dengan adanya guru yang bermutu maka sistem itu tidak akan berfungsi (Sutrisno, 2022).

Dalam kebijakan merdeka belajar, terdapat faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu proses pembelajaran, dimana pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa (Arsyad & Widuhung, 2022). Dari proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran hendaknya dirancang agar dapat menumbuhkan motivasi dan mendukung siswa untuk memiliki empat kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi bangsa dalam menghadapi abad 21. Revolusi indutri keempat terjadi pada abad ke-21, dimana pada masa ini itu telah terjadi perkembangan teknologi yang begitu pesat tanpa kita pungkiri (Nofia, 2020). Keempat kompetensi tersebut sering disebut dengan 4C yaitu communication (komunikasi), collaboration (kerjasama), critical thinking (berpikir kritis), creativity (daya cipta). Selain empat kompetensi tersebut, pendidikan juga harus menumbuhkan karakter pada diri siswa. Dimana pendidikan karakter dalam konteks saat ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang menimpa generasi muda di negara ini. Dengan dimasukannya keempat kompetensi dengan ditambah penguatan pendidikan karakter diharapkan akan menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas.

Salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya adalah kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara dominan ditentukan oleh keandalan manajemen sekolah yang bersangkutan, sedangkan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Dalam lingkungan pendidikan, kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Menjadi teladan baik secara moral maupun profesional. Secara moral artinya perilaku kepala sekolah benar-benar menjadi teladan baik bagi guru, siswa maupun masyarakat. Secara profesional kepala sekolah harus mampu membuktikan bahwa dalam bekerja tidak hanya didasarkan pada ego atau keinginannya saja, akan tetapi menggunakan pedoman dan prinsip yang jelas (Baro'ah, 2020). Dengan demikan sasaran yang dicapai akan sesuai dengan kriteria profesional yang ditetapkan.

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan yang diharapkan mampu memperdayakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu dan berpengetahuan, serta manusia terdidik. Oleh karena itu pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan yang harus dibenahi oleh seluruh institusi pendidikan. Pemerintah juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya sekedar menjadi pihak yang berwenang menyalurkan dana, akan tetapi pemerintah juga berwenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Seperti halnya gebrakan baru mengenai merdeka belajar yang diharapkan akan memberikan kontribusi lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset dan potensi bangsa yang sangat penting untuk mengisi pembangunan di berbagai bidang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merdeka belajar pada hakikatnya dapat memberikan solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberadaan merdeka belajarbisa menjadi terobosan baru dalam melakukan inovasi pembelajaran yang lebih bermutu dan adaptif terhadap perubahan. Selain itu kebijakan merdeka belajar juga sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan yang dapat melalui proses pembelajaran, komitmen guru, peranan kepemimpinan kepala sekolah serta manajemen kurikulum pendidikan dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta kebutuhan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman, teknologi, mapun perubahan kehidupan, maka pendidikan diharapkan berjalan dengan terarah, tersusun, terencana dan berkelanjutan agar mewujudkan generasi lulusan terbaik dengan kualitas pendidikan yang terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Afista, Y., Priyono, A., & Huda, S. A. A. (2020). Analisis Kesiapan Guru PAI dalam Menyongsong Kebijakan Merdeka Belajar (Studi Kasus Di MTSN 9 Madiun). *Journal of Education and Management Studies*, *3*(6), 53–60. https://www.ojs.unwaha.ac.id/index.php/joems/article/view/338

Agustinus Tangga Daga. (2022). Penguatan Peran Guru Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar. *ELSE (Elementary Scholl Educarion Journal) Jurnal*

Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar, *6*(1), 1–24.

Arsyad, A. T., & Widuhung, S. D. (2022). Dampak Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Kualitas Mahasiswa. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *3*(2), 88. https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i2.1027

Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, *4*(1), 1063–1073.

Desrianti, & Yuliana Nelisma. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Perpektif Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(2), 158–172. https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i2.309

Husni, A. (2023). *Kompetensi Guru PAI Bersertifikasi Terhadap Penerapan Kurikulum PAI pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam*. *5*(1), 600–614.

Muslikh. (2020). Landasan Filosofis Dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka. *Jurnal Syntax Transformation*, *1*(3), 40–46. https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.29

Nofia, N. N. (2020). Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(2), 61–72. https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i2.3328

Rahmansyah, M. F. (2021). Merdeka Belajar: Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah/Madrasah. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 47–52. https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13905

Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan Masalah dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(01), 219–240. https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2859

Saputra, H. Y. (n.d.). *Metode Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendidikan Agama Islam*. 1–10.

Sari, R. M. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(1), 38–50. https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3326

Sutrisno. (2022). Mengembangkan Kompetensi Guru Dalam Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran Di Era Merdeka Belajar. *ZAHRA: Research And Tought Elmentary School Of Islam Journal*, *3*(1), 52–60.

Syahrul Kaffin Robbani, Ika Ratih Sulistiani, S. J. (2023). *Analisis Peran Guru Sebagai Fasilitator Bagi Siswa Kelas VII Di SMP N 5 Karangploso*. *8*.

Ummul, I., & Bogor, Q. A. (2023). *Analisis Implementasi Program Kurikulum Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan, Rahmawati Alwi , Rosi Indriyani*. *6*(1), 67–73.